



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber
PEMBEKALAN KEISTIMEWAAN
BAGI PNS MUTASI ANTAR DAERAH
Yogyakarta, 26 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Para Narasumber;
Hadirin dan Para Peserta Pembekalan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk mengawali pembekalan ini saya sampaikan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) telah disahkan pada 31 Agustus 2012, hal ini sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat DIY, karena apa yang telah kita usahakan selama bertahun-tahun sejak tahun 2003 telah dapat tercapai. Undang-undang Keistimewaan ini berisi *16 bab* dan *51 pasal*, setelah ditandatangani Presiden,

UUK DIY ini masuk dalam Lembaran Negara Nomor 170 serta masuk ke dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339.

Keistimewaan ini merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus Kewenangan Istimewa. Sedangkan Kewenangan Istimewa merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ada lima Kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, pada Pasal 7 ayat 4 yaitu mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Sebelumnya kita juga harus memahami bahwa Status Keistimewaan yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam *Sejarah Pendirian* Negara Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum

dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini.

Selain itu, berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 juga telah dinyatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa“.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Selain itu ada beberapa nilai dasar tentang Keistimewaan DIY yang mencakup:

1. *Hamemayu Hayuning Bawana*, Menjaga sikap dan perilaku manusia yang selalu menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2. *Sangkan Paraning Dumadi*, Tuhan ialah asal muasal dan tempat kembali segala sesuatu.

3. *Manunggaling Kawula lan Gusti*, Kepemimpinan yang merakyat dan piwulang simbol ketata ruangan.
4. *Tahta untuk rakyat*, Hamengku, Hamengku, Hamengkoni (menegaskan keberpihakan kasultanan terhadap rakyat).
5. *Golong gilig*(persatuan dan kesatuan), *sawiji* (konsentrasi mewujudkan visi), *greget* (dinamik dan semangat), *sungguh* (kebanggaan dan kepercayaan), *ora mingkuh* (bertanggungjawab).
6. *Catur Gatra Tunggal*, Kesatuan empat susunan yang terdiri kraton, masjid, alun-alun, dan pasar (unsur keabadian kota) dikaitkan dengan sumbu filosofis dan imajiner.
7. *Pathok Negara*, Filosofi tata ruang untuk memberikan tuntunan teritori spasial tuntunan pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan sosial budaya kasultanan

Selain itu Pemerintah Daerah DIY juga tetap memegang teguh dasar filosofi dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu *Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah*. Berdasarkan kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Saudara-saudara sekalian,

Dengan keistimewaan ini maka diharapkan dapat berfungsi untuk: membuka pintu demokrasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kultural yang telah tertanam dalam perjalanan

historis bangsa Indonesia; keistimewaan tidak harus selalu dipahami sebagai perlakuan diskriminasi, namun nilai-nilai kesetaraan dalam hukum, (*equality before the law*) juga tetap diangkat dan dibudayakan; bahwa peran Kasultanan dan Puro Pakualaman sebagai Dwi Tunggal Hamengkoni Agung Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemersatu dan pelindung dari kondisi sosial kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat pluralistik telah terbukti sepanjang sejarah Indonesia modern; untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak saja hanya diukur dari aspek ekonomi melalui pengukuran pendapatan perkapita masyarakat tetapi juga dapat diletakkan dalam konteks keharmonisan ketentraman maupun rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat.

Kebudayaan sebagai salah satu aspek keistimewaan DIY harus mampu pembentuk manusia utama, sehingga akan mempunyai idealisme, komitmen yang tinggi, integritas moral, nurani yang bersih. Dalam kondisi seperti saat ini semua sudah terkontaminasi kepentingan-kepentingan politik, maka dengan kebudayaan akan memberikan keseimbangan hidup. Dengan demikian maka implementasi dari UU Nomor 13 tahun 2012, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara perubahan dan mempertahankan nilai-nilai luhur dalam perkembangan peradaban modern yang tidak bisa ditolak.

Selain itu, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY harus dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli, sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat saya sampaikan sekelumit gambaran keistimewaan DIY. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih, atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber
RAPAT KERJA
KESEHATAN NASIONAL 2019
“KOLABORASI PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN MENUJU
CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA”
Tangerang, 13 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Peserta Rakerkesnas, Hadirin dan saudara sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insy Allah* penuh berkah ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah Swt*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2019, dengan tema “Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta”.

Peserta Rakerkesnas dan Hadirin yang kami hormati,

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), dimaksudkan untuk mencapai derajat kesehatan yang layak bagi masyarakatnya. Tetapi seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang muncul harus secepatnya diselesaikan. Karena berkembangnya permasalahan dan tantangan baru di bidang kesehatan, akan selalu diikuti dengan adanya keharusan untuk melakukan berbagai penyempurnaan. Terkadang kita juga perlu melakukan berbagai terobosan-terobosan baru dalam rangka peningkatan layanan terhadap kesehatan masyarakat.

Bidang kesehatan sangat *basic* dan sangat fundamental sekali untuk secepatnya ditangani dan diselesaikan. Harapannya, jangan sampai ada lagi kasus-kasus kesehatan di masyarakat tidak sampai tertangani dan terselesaikan dengan baik. Hal itu mengingat di era keterbukaan seperti sekarang ini kita harus mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain jika tidak ingin tertinggal.

Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, merupakan target Pemerintah Indonesia untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana UHC ditargetkan tahun 2019 tahun ini.

Hadirin sekalian,

Sementara kepesertaan DIY pada BPJS-Kesehatan hingga 31 Juli 2017 telah mencapai 2.918.276 jiwa atau 80,97 persen dari total penduduk. Sehingga untuk mencapai target UHC tahun ini, kita harus mengejar ketertinggalan kepesertaan tersebut sekitar 20 persen.

Sebagian besar peserta BPJS-Kesehatan melalui Program JKN–Kartu Indonesia Sehat (KIS) di DIY merupakan katagori mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Segmen yang hingga kini masih sulit dijangkau BPJS Kesehatan, adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Karena mereka biasanya memiliki jaminan asuransi komersial. Tetapi kita berupaya akan tetap mengejar karena sesuai UU kepesertaan BPJS adalah wajib untuk semua.

Satu anekdot yang sering kita dengar menyebutkan, jika keengganan sebagian masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN dikarenakan kepercayaan yang sangat dalam bahwa sakit sudah ditakdirkan Tuhan. Meski anekdot ini tidak sepenuhnya benar, akan tetapi sifat fatalis masyarakat, ada kalanya mempengaruhi pengambilan keputusan. Perencanaan terhadap sesuatu yang belum pasti dianggap *nggege mangsa* dan salah-salah menjadi sebuah ‘doa’ meminta diberi sakit.

Kondisi seperti itulah yang kemudian memunculkan berbagai kendala, mulai dari besaran iuran, kesulitan BPJS-Kesehatan dalam mendorong kepesertaan pekerja sektor informal dan kelompok muda, fasilitas kesehatan yang belum merata, peserta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, hingga pelayanan kesehatan yang belum sesuai harapan, membuat sebagian masyarakat memilih tidak menjadi peserta JKN. Akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut kendala ini, terutama keengganan sebagian masyarakat untuk menjadi peserta, salah satunya dapat dipahami dari kondisi sosio-historis masyarakat. Hal itu menyebabkan sebagian masyarakat baru mendaftar menjadi peserta ketika dirinya atau ada anggota keluarganya ada yang sakit.

Menurut Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMMAK) Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, M Syamsu Hidayat, dalam beberapa kajian yang dilakukan menyebutkan, sikap fatalis (orang yang percaya

atau menyerah saja kepada nasib) bisa dirasakan tetapi tidak terlihat dominan. Pada umumnya masyarakat, terutama di perkotaan, sudah memahami pentingnya jaminan kesehatan. Akan tetapi keputusan untuk menjadi peserta tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat tersebut.

Ada berbagai faktor selain pemahaman terhadap jaminan yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota. Faktor usia misalnya, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menjadi peserta karena merasa sehat dan masih muda. Sehingga untuk saat ini belum merasa memerlukan jaminan kesehatan. Sebagian yang lain beralasan pengalaman teman, tetangga, atau saudara yang kurang baik, membuat mereka enggan untuk mendaftar. Sedangkan di pedesaan, faktor kurangnya pemahaman terhadap pentingnya jaminan kesehatan, cara mendaftar, dan tempat mendaftar masih sangat kurang.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta, kita tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal peningkatan pemahaman masyarakat di daerah pedesaan, perlu melibatkan pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan sejenisnya. Selain itu isi program sosialisasi seyogyanya fokus pada hak, kewajiban, manfaat dan prosedur dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya.

Khusus untuk kelompok usia muda, kita perlu mengadopsi strategi untuk menarik minat kelompok ini, misalnya dengan mengintensifkan sesi konsultasi tatap muka. Meskipun informasi JKN bisa diakses di internet, tetapi interaksi secara langsung sangat diperlukan, mengingat masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Selanjutnya melalui strategi komunikasi *Gethok Tular*, kiranya sangat tepat digunakan untuk merangkul masyarakat didasarkan pada kearifan lokal. Contoh kongkritnya bisa kita lihat, jika ada pelayanan yang kurang menyenangkan di rumah

sakit, melalui pola komunikasi *Gethok Tular* ini, informasi tersebut dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program JKN. Dalam konteks itu, maka penguatan kompetensi dokter tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga teknik berkomunikasi sangat diperlukan, baik di Puskesmas maupun di rumah sakit, selain pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan obat-obatan. Tanpa adanya usaha yang *extra ordinary*, tanpa ada berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, serta mempercepat cakupan kepesertaan, tampaknya cakupan kesehatan semesta hanya sebatas angan-angan saja.

Peserta Rakerkes dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan yang sangat penting ini berjalan lancar, mampu menciptakan kolaborasi dan sinergitas kualitas para pemangku kepentingan yang diorientasikan untuk meningkatkan partisipasi kita semua dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tangerang, 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber
WORKSHOP
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Para Narasumber yang saya hormati,
- Peserta Workshop, Hadirin dan Saudara sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insy Allah* penuh berkah ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadiran *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, untuk mengikuti kegiatan Workshop Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta Workshop dan Hadirin yang kami hormati,

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemda DIY, dimaksudkan untuk mencapai derajat kesehatan yang layak bagi

masyarakatnya. Tetapi seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang muncul harus secepatnya diselesaikan. Karena berkembangnya permasalahan dan tantangan baru di bidang kesehatan, akan selalu diikuti dengan adanya keharusan untuk melakukan berbagai penyempurnaan. Terkadang kita juga perlu melakukan berbagai terobosan-terobosan baru dalam rangka peningkatan layanan terhadap kesehatan masyarakat.

Bidang kesehatan sangat *basic* dan sangat fundamental sekali untuk secepatnya ditangani dan diselesaikan. Harapannya, jangan sampai ada lagi kasus-kasus kesehatan di masyarakat tidak sampai tertangani dan terselesaikan dengan baik. Hal itu mengingat di era keterbukaan seperti sekarang ini kita harus mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain jika tidak ingin tertinggal.

Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mengamanahkan *Universal Health Coverage* (UHC) Jaminan Kesehatan 2019, tetapi belum dapat sepenuhnya terpenuhi. Berbagai tantangan terus diupayakan untuk diselesaikan. Dari sisi pembiayaan menghadapi tantangan *deficit* anggaran yang banyak dipengaruhi oleh permasalahan *dropout* kelompok mandiri. Hal ini telah mempercepat adanya integrasi pembiayaan daerah untuk PBI-APBD. Kondisi ini memunculkan permasalahan dikaitkan dengan *fiscal* dan kebijakan daerah.

Tantangan lain yang dihadapi Gubernur/Bupati/Walikota saat ini adalah untuk dapat menjamin warga dari kelompok miskin, marginal, dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) miskin bermasalah, yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak dapat mengakses layanan. Permasalahan

ini diperkirakan masih akan ada dan berlangsung dalam jangka panjang.

Selanjutnya, sebagaimana diamanahkan Undang-undang Dasar, perlindungan kelompok rentan menjadi kewajiban pemerintah, sehingga alternatif sistem pendamping JKN menjadi pilihan saat ini. Pendampingan ini tentunya juga dibarengi dengan upaya daerah dalam meningkatkan kepesertaan mandiri, kontrol kualitas JKN dan sistem pendataan kepesertaan yang lebih baik.

Kendati kepesertaan penduduk DIY pada BPJS- Kesehatan hingga 31 Juli 2017 telah mencapai 2.918.276 jiwa atau 80,97 persen dari total penduduk, tetapi untuk mencapai target UHC tahun 2019 ini, kita harus mengejar ketertinggalan kepesertaan tersebut sekitar 20 persen. Sebagian besar peserta melalui Program JKN–Kartu Indonesia Sehat (KIS) di DIY merupakan kategori mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Segmen yang hingga kini masih sulit dijangkau adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, tetapi kita berupaya akan tetap mengejar karena sesuai UU kepesertaan BPJS adalah wajib untuk semua.

Pembangunan jaminan kesehatan DIY telah diamanatkan oleh Gubernur DIY pada saat pidato pelantikan Gubernur DIY Masa Bakti 2012-2017. *Renaissance* kesehatan DIY diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin, hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.

Renaissance kesehatan khususnya di bidang jaminan sosial, ditunjang dengan penciptaan sistem jaminan pelayanan kesehatan terintegrasi dan pengembangan program asuransi *universal coverage* dengan kepemilikan ‘Kartu Sehat’ bagi masyarakat miskin untuk memudahkan mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan murah.

Dalam konteks itu, maka Pemerintah Daerah DIY telah mengembangkan kebijakan layanan jaminan pendamping JKN untuk menutup kekurangan tersebut. Pemda DIY sejak tahun 2016, sebagai wujud komitmen sebagai amanah UU SJSN dan UU Pemerintah Daerah, juga telah merintis penanganan dalam konteks pembiayaan melalui system jaminan preventif dan rehabilitatif, walaupun kelengkapan dalam layanan JKN kita tidak memiliki. Selain penanganan berbagai permasalahan prioritas kesehatan seperti penyakit tidak menular, prevalensi, pertumbuhan disabilitas, stunting, kesehatan jiwa, rehabilitasi usia lanjut miskin sakit dan lain sebagainya.

Pendampingan dan pengembangan di DIY dapat dilaksanakan, mengingat DIY memiliki regulasi dan kebijakan sistem jaminan yang dilaksanakan oleh Unit Balai Penyelenggaraan Jamkesos. Disisi lain, berbagai pengembangan dikaitkan dengan integrasi kepesertaan penduduk miskin dan *single player* penyelenggaraan jaminan telah memunculkan berbagai perdebatan. Kasus kelompok miskin marginal tercecer, proses pendaftaran, validitas, peserta JKN miskin bermasalah dan lain sebagainya, telah mendorong pendapat lain terkait kepentingan daerah dalam melindungi warganya, mengingat JKN tidak dapat menjangkau hal tersebut.

Oleh karena itu Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta DIY yang digagas tahun 2010 mengusung visi mewujudkan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk DIY (Kesemestaan). Dan saat ini visi kesemestaan di DIY telah memasuki babak baru dengan kehadiran JKN yang menempatkan Jamkesta sebagai pendukung kebijakan Universal Health JKN. Sedangkan Jaminan Paripurna merupakan visi kedua Jamkesta DIY yang mengusung cita-cita mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh, meliputi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, jaminan khusus yang terintegrasi harmonis dalam program JKN.

Penyelenggaraan pelayanan Jamkesta tersebut, telah diatur dalam regulasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta. Regulasi Pergub tersebut memberikan arah dalam mewujudkan integrasi mendukung pencapaian tujuan JKN di DIY, melalui program jaminan kesehatan penyangga (kesemestaan) dan jaminan kesehatan pendamping (paripurna). Selanjutnya pencapaian jamkesta, UHC dan pelayanan kesehatan paripurna ditetapkan menjadi fokus dalam kebijakan sistem jaminan kesehatan di DIY.

Peserta Workshop dan Hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap tantangan utama yang dihadapi saat ini, yaitu perlindungan terhadap kelompok rentan yang belum masuk JKN dan pengembangan layanan jaminan kesehatan paripurna yang belum sepenuhnya dilakukan JKN, dapat dirumuskan dalam workshop kebijakan jaminan kali ini. Selanjutnya rekomendasi dari rangkaian kegiatan ini, diharapkan juga dijabarkan secara lebih teknis dalam kebijakan teknis layanan, dikaitkan dengan berbagai program jaminan yang akan diwujudkan.

Selamat berdiskusi, semoga kegiatan yang sangat penting ini berjalan lancar, mampu menciptakan kolaborasi dan sinergitas kualitas para pemangku kepentingan yang diorientasikan, untuk meningkatkan partisipasi kita semua dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, serta dalam kebijakan jaminan kesehatan di DIY.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
FOCUS GROUP DISCUSSION
LAPORAN PENDAHULUAN ANALISIS KEBIJAKAN
TENAGA KERJA DI WILAYAH TERTINGGAL
Unit IX Kompleks Kepatihan, 27 Februari 2019

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

- Yang saya hormati; Para Narasumber;
- Para Tamu Undangan dan Hadirin, khususnya para Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir ditempat ini dalam rangka mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Kebijakan Tenaga Kerja di Wilayah Tertinggal.

Bapak/Ibu dan Saudara yang saya hormati,

Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional, regional dan sektoral. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penduduknya yang cukup banyak, memiliki potensi yang

besar baik sebagai pelaku pembangunan maupun pada potensi pasar kerja. Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Ketenagakerjaan sebagai salah satu bidang pembangunan yang mencakup segala aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang masih dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini antara lain adalah 1). rendahnya pendayagunaan angkatan kerja yang tersedia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran terbuka. 2). masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal di DIY didominasi oleh tamatan sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan yang tidak pernah sekolah dan 3). rendahnya produktivitas, perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, ada banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan kebijakan strategis ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Hadirin yang saya hormati,

Tantangan ketenagakerjaan ke depan diperkirakan semakin berat dan kompleks. Kualitas angkatan kerja diperkirakan semakin meningkat sehingga menuntut adanya pelayanan pasar kerja yang mudah dan murah, serta tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang ada. Selain itu, dengan semakin terbukanya pasar bebas maka upaya peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar internasional maupun pasar dalam negeri menjadi hal yang wajib dilakukan. Industrialisasi ke depan juga diperkirakan akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, perlindungan tenaga kerja dituntut untuk sesuai dengan perkembangan tersebut.

Perubahan latar belakang pendidikan tenaga kerja ini tentu akan mengakibatkan perubahan pada pola-pola pembangunan bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, pembangunan bidang ketenagakerjaan pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang, agar mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan sesuai dengan perkembangan angkatan kerja.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah *link and match* di dunia kerja. Saat ini kebutuhan pasar kerja masih diwarnai oleh ketidaksesuaian dengan tenaga kerja yang tersedia, baik dari segi pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dll. Hal ini berakibat pada kurang baiknya kinerja kelembagaan pasar kerja Indonesia, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi proses penanaman investasi. Pada gilirannya, hal tersebut akan mengakibatkan munculnya pengangguran, kurang meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang ada di Indonesia, rendahnya daya saing dan kurangnya kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga tantangan pembangunan bidang ketenagakerjaan pada masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan kinerja

program pelatihan dan penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan semakin deras arus globalisasi, standar ketenagakerjaan yang bersifat universal yang menghargai hak-hak dasar pekerja sebagaimana tercantum dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) maupun berbagai lembaga internasional lainnya semestinya diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, hambatan bebas tarif yang diberlakukan bagi semua negara anggota ASEAN dalam era globalisasi ini telah memicu persaingan yang sangat kompetitif di antara negara-negara tersebut. Arus globalisasi menuntut hadirnya paradigma baru dalam pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan sosial, kesiapan dunia usaha, kesiapan pihak pekerja/buruh dan pemerintah sendiri. Untuk dapat bersaing di pasar global, pengusaha harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dunia usaha yang terkadang dapat merugikan pekerja. Sementara itu, pekerja juga menginginkan peningkatan perlindungan tenaga kerja serta perbaikan syarat-syarat kerja. Namun, apabila tuntutan tersebut berlebihan maka hal tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha dan menurunkan daya saing perusahaan.

Menghadapi hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang fleksibel yang mampu mengakomodasikan keinginan-keinginan unsur pekerja dan pengusaha, dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif bagi peningkatan produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penghasilan masyarakat secara berkesinambungan.

Peserta FGD yang berbahagia,

Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2008 sebesar

226,7 Juta orang, diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting, untuk diperhatikan demi menciptakan penduduk tumbuh dengan seimbang, yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Besarnya penduduk usia produktif tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah peran dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi ketenagakerjaan, mendorong dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja, melindungi tenaga kerja dan lain sebagainya.

Melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Kebijakan Tenaga Kerja di Wilayah Tertinggal ini, diharapkan dapat mengakomodir masukan dan pemikiran dari berbagai pihak untuk Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dalam menyusun bahan perumusan kebijakan strategis bidang ketenagakerjaan di DIY.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara peserta FGD yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Akhirnya, dengan memohon ridho seraya mengucapkan "*Bismillaahirrahmanairrahiim*" *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Kebijakan Tenaga Kerja di Wilayah Tertinggal, saya nyatakan dibuka secara resmi.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Unit IX Kompleks Kepatihan, 27 Februari 2019

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH DIY

Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si.



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
FORUM KEISTIMEWAAN DIY
Gedung Radyosuyoso, 21 Februari 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri RI, Direktur Otonomi Daerah Bappenas RI serta Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kemenkeu RI sebagai Narasumber;
- Hadirin dan Para Peserta Forum Keistimewaan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya menyambut baik kegiatan Forum Keistimewaan oleh Paniradya Kaistimewaan DIY, dengan harapan kegiatan ini dapat menjadi forum dalam melakukan koordinasi dan menyinergikan program-program atau kegiatan pembangunan urusan keistimewaan, pada tingkat DIY dan Kabupaten/Kota dalam kontek sektoral maupun kewilayahan.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita menyadari bahwa UUD 1945 (Amandemen) yang biasa disebut UUD NRI 1945 mengatur tentang Desentralisasi dan Satuan Pemerintahan Daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model desentralisasi simetris (seragam) dan mengakui pula desentralisasi asimetris (beragam). Pengaturan tentang Desentralisasi Asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa *“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”*.

Selanjutnya desentralisasi asimetris telah dilakukan pemerintah atau negara kepada DIY. Secara legal formal tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, titik tekan keistimewaannya terdapat dalam 5 (lima) hal yaitu pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang disesuaikan dengan keinginan rakyat atau masyarakat DIY itu sendiri.

Untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan tersebut maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam kerangka perencanaan pembangunan urusan keistimewaan di DIY. Sehingga forum ini memiliki nilai yang sangat penting dalam konteks perencanaan makro di DIY, mengingat kegiatan ini menjadi inti dari seluruh kegiatan urusan keistimewaan di DIY. Di mana proses pembangunan daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses, untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah, dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan keistimewaan ini maka diharapkan dapat berfungsi untuk: membuka pintu demokrasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kultural yang telah tertanam dalam perjalanan historis bangsa Indonesia. Keistimewaan tidak harus selalu dipahami sebagai perlakuan diskriminasi, namun nilai-nilai kesetaraan dalam hukum, (*equality before the law*) juga tetap diangkat dan dibudayakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak saja hanya diukur dari aspek ekonomi, melalui pengukuran pendapatan perkapita masyarakat tetapi juga dapat diletakkan dalam konteks keharmonisan ketentraman maupun rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat.

Kebudayaan sebagai salah satu aspek keistimewaan DIY juga harus mampu pembentuk manusia utama, sehingga akan mempunyai idealisme, komitmen yang tinggi, integritas moral, nurani yang bersih. Dalam kondisi seperti saat ini semua sudah terkontaminasi kepentingan-kepentingan politik, maka dengan kebudayaan akan memberikan keseimbangan hidup. Dengan demikian maka implementasi dari UU Nomor 13 tahun 2012, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara perubahan dan mempertahankan nilai-nilai luhur dalam perkembangan peradaban modern yang tidak bisa ditolak.

Selain itu, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY harus dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli, sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT, Forum Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gedung Radyosuyoso, 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN
ANGGARAN 2019

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta;
- Para Narasumber;
- Para Peserta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau, tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun harus diakui bahwa Indonesia juga merupakan negara yang dikenal rawan bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor hingga banjir.

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan. Masyarakat yang terkena dampak bencana alam menjadi tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Akibatnya seluruh sektor pembangunan akan terganggu.

Dengan melihat kondisi yang ada, maka sangat dibutuhkan tindakan komprehensif untuk merespon bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Selama ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi masalah bencana alam yaitu penanggulangan bencana alam, penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam.

Tiga hal tersebut mutlak harus diperhatikan oleh seluruh pihak. Kendati demikian, penanggulangan bencana perlu mendapat perhatian lebih dalam mengatasi masalah ini. Bagaimanapun dengan penanggulangan bencana alam sejak dini, bukan tidak mungkin korban materil bahkan korban jiwa bisa terhindar. Sehingga penanganan dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih mudah.

Hadirin sekalian,

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menangani bencana bukan saja terletak pada ketersediaan perangkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kebencanaan,

tetapi juga implementasi perangkat kebijakan tersebut di lapangan. Dihadapan perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia serta perubahan global yang sangat cepat, bukan tidak mungkin implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Penanggulangan Bencana mengalami hambatan.

Sebagai contoh, kebijakan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat ternyata tidak dengan sendirinya meningkatkan kemampuan daerah menangani bencana. Kebijakan otonomi daerah sering dipahami terbatas sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelolanya secara bertanggungjawab.

Penggeseran wewenang dari pusat ke daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akibatnya, pada saat bencana terjadi tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkali tergantung pada pusat. Keadaan ini menjadi semakin rumit apabila bencana tersebut meliputi lebih dari satu daerah. Dilain pihak, pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar tataran pemerintahan menghambat pelaksanaan tanggapan yang cepat, optimal dan efektif.

Diterbitkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang kebencanaan serta pengalaman penanganan bencana-bencana besar yang telah terjadi menegaskan pentingnya fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana secara sistemik, terintegrasi dan komprehensif. Adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi kegamangan, mendorong koordinasi para pihak yang terlibat dalam tahap penanganan bencana yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan bencana yang lebih efektif.

Sebagai bagian dari keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi.

Dalam tahapan rekonstruksi, maka diperlukan suatu proses rekonstruksi yang tepat, berdasarkan perencanaan yang baik, sehingga tepat sasaran dan juga tertib dalam penggunaan dana, serta mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana dimasa datang melalui usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Proses rekonstruksi pasca bencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat, baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, dan mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana, bukan memperparah kondisi kerentanan yang ada yang menyebabkan terjadinya bencana.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Indonesia memang negara yang akrab dengan bencana alam, bahkan setiap tahun terjadi bencana yang seringkali memakan korban jiwa. Namun dengan penanggulangan bencana alam, penanganan bencana alam dan pemulihan pasca bencana alam yang baik maka korban bisa semakin diminimalisir. Bencana alam memang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sebagai makhluk ciptaanNya kita wajib senantiasa mencintai alam agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEKAN OLAHRAGA
ANTAR INSTANSI BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMDA
DIY
Yogyakarta, 11 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Para Pembina Olahraga Instansi di Lingkungan Pemda DIY;
Para Atlet dan Oficial, yang saya banggakan;
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita bersama-sama, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Pembukaan Pertandingan Olahraga antar Instansi bagi PNS di Lingkungan Pemda DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya saya menyambut baik diselenggarakannya Pertandingan kali ini. Dengan digelarnya even ini oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY. Tentunya kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting, tidak hanya menjadikan tubuh sehat, segar dan bugar, namun juga dapat membangun hubungan persaudaraan, persatuan yang lebih kuat lagi diantara sesama

anggota PNS di Lingkungan Pemda DIY. Sekaligus menjadi ajang guna menunjukkan jiwa sportifitas dan semangat untuk berolahraga dari para atlet.

Dengan keberadaan even ini, secara jelas membuktikan bahwa olahraga itu sangat penting, dalam membentuk PNS yang tangguh. "*Mens sana in copore sano*", yaitu di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat pula. Olahraga yang dibangun dengan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian di lingkungan kerja, dan seterusnya, akan menjadikan olahraga sebagai bagian dari budaya hidup sehat.

Kegiatan ini selain untuk membentuk semangat berolahraga bagi unsur PNS, tentunya juga merupakan ajang untuk meraih prestasi, dan hanya dengan keuletan dan kerja keraslah, prestasi gemilang olahraga dapat kita wujudkan. Sehingga momentum ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para atlet, ofisial serta tim pendukung lainnya, dengan mengingat bahwa kejuaraan ini merupakan barometer untuk mengukur keberhasilan dalam pembinaan olahraga di kalangan PNS yang dipertandingkan di tingkat Pemda DIY.

Selain itu, sesuai dengan jiwa yang terkandung didalam olahraga yaitu sportivitas, maka para atlet serta tim pendukung lainnya diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas. Memang harus berusaha secara maksimal untuk meraih prestasi terbaik, tetapi jangan sampai prestasi tersebut tercoreng dengan perbuatan yang menyimpang dari unsur sportivitas, dengan menjunjung permainan yang bersih dan cantik sehingga akan diperoleh hasil yang sempurna.

Hadirin dan Para Atlet yang berbahagia,

Pembinaan dan gerakan olahraga yang dilakukan jajaran PNS ini, tentunya banyak memberikan inspirasi kepada masyarakat luas betapa pentingnya berolahraga. Dan sekiranya

hal ini juga telah dilaksanakan secara rutin oleh jajaran PNS di hampir setiap kantor di Pemda DIY.

Harapan terakhir semoga olahraga di kalangan PNS ini dapat membentuk aparatur yang tangguh, sehat jasmani dan rohani. Sehingga akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas dengan lancar dan optimal.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” Pertandingan Olahraga Antar Instansi bagi PNS di Lingkungan Pemda DIY, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KEPALA SEKOLAH DAN
PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DIY
Yogyakarta, 1 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Segenap Jajaran Pimpinan Sekretariat Daerah dan OPD Pemda DIY;
- Para Rohaniwan;
- Para Pejabat Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah dan Pejabat Fungsional yang hari ini dilantik;
- Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Momentum pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan pada hari ini, memegang peranan penting bagi kita semua, terlebih bagi Saudara-saudara yang baru dilantik, untuk menempati tugas sebagai Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.

Sehingga semua ini harus terus disyukuri sepenuhnya terhadap amanah dan tanggung jawab yang akan Saudara-saudara emban. Bahwa di satu sisi, tugas dan jabatan adalah kepercayaan dan kehormatan. Tetapi di sisi lain merupakan tantangan, ujian dan cobaan, sekaligus godaan. Untuk itulah, saya berharap dan mengajak, marilah kita laksanakan amanah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat yang terbaik, untuk lembaga yang kita cintai ini dan terlebih di dalam pengabdian secara prima untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sebab, pada akhirnya pada tingkat apapun tanggung jawab kita dan sebesar apapun amanah yang dibebankan, kita harus mempertanggungjawabkannya tidak hanya kepada diri sendiri, keluarga, tetapi juga dan terlebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saya percaya, penempatan Saudara-saudara sebagai seorang Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah, Pejabat Fungsional sekiranya sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, dan merupakan figur yang memiliki kualifikasi serta kredibilitas yang baik, telah dipilih secara selektif, obyektif dan

cermat serta telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab tantangan yang akan kita hadapi di era global saat ini sangatlah berat, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mumpuni secara fisik baik sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kompetensi dan semangat juang yang tinggi untuk memajukan DIY, dengan kreativitas dan inovasinya.

Dengan makna tersebut, maka pelantikan kali ini, kiranya dapat menjadi satu pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggungjawab kita bersama dan terlebih pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya atas nama pribadi, dan selaku pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan “*Selamat*” kepada para Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah serta Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik, selamat memangku jabatan baru, selamat bekerja dan bertugas dengan jujur, ikhlas, penuh ketulusan dalam rangka pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
DIKLAT IDEOLOGI PANCASILA, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KEISTIMEWAAN DIY ANGKATAN I
TAHUN 2019

Gunungsempu, 25 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Para Widyaiswara dan Para Instruktur;
- Saudara-saudara Peserta Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2019;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini guna mengikuti Pembukaan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2019, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Peserta Diklat sekalian yang berbahagia,

Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Kondisi ini dapat terjadi karena dalam perjalanan sejarah dan adanya kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti adanya keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan melalui nilai dasar Pancasila.

Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang berlandaskan Pancasila, sehingga dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Pancasila tidak sekadar slogan, tetapi harus dipraktekkan. Pancasila akan menjadi sakti kalau Pancasila jadi kepribadian bangsa.

Kita wajib untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental ideologi Pancasila. Seperti halnya kewaspadaan tantangan globalisasi, liberalisasi dan postmodernisme. Kemampuan menghadapi tantangan mendasar yang akan melanda kehidupan bangsa seperti sosial-ekonomi dan politik, bahkan mental dan moral bangsa. Maka benteng terakhir yang diharapkan mampu bertahan ialah dengan keyakinan nasional atas kebenaran dan keunggulan dasar negara Pancasila baik sebagai filsafat hidup bangsa atau *Weltanschauung*, maupun sebagai dasar negara.

Hanya dengan keyakinan nasional inilah manusia Indonesia tegak dan tegar dengan keyakinannya yang benar dan terpercaya, bahwa sistem filsafat Pancasila sebagai bagian dari filsafat timur, mengandung dan memancarkan identitas dan integritas martabatnya. Secara filosofis-ideologis dan konstitusional berfungsi sebagai asas kerokhanian bangsa Indonesia, jiwa dan

kepribadian bangsa sekaligus sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Hadirin sekalian,

Terkadang suatu teori atau konsep sangat bertentangan dengan prakteknya secara nyata. Dimana nilai-nilai luhur Pancasila telah ternoda oleh perilaku KKN, pelanggaran Hak Asasi Manusia, usaha disintegrasi bangsa, mementingkan kelompok, serta pelanggaran terhadap keadilan sosial masyarakat. Untuk itulah, pembangunan terhadap kepribadian bangsa sudah menjadi hal yang sangat penting pada saat ini.

Perilaku-perilaku menyimpang yang telah membudaya hanya dapat diberantas secara tuntas dengan mengubah pola pikir dan kepribadian para pelaku. Terkadang, memang sulit untuk menentukan parameter yang sesuai untuk itu. Terlebih dengan kemajemukan bangsa Indonesia, dan disinilah kita semestinya kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila.

Melalui Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2019 ini, Saya berharap para peserta tidak hanya mempelajari dan mengerti mengenai materi diklat, akan tetapi yang lebih dari itu adalah penerapan pelaksanaannya secara nyata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terlebih pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan saat ini, para peserta harus dapat mengimplementasikannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila, Wawasan Kebangsaan Dan Keistimewaan DIY, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Diklat Ideologi

Pancasila, Wawasan Kebangsaan Dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2019, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Gunung Sempu, 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) DIY
TAHUN 2020
Yogyakarta, 11 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati, Pimpinan DPRD DIY;
Yang saya hormati, Para Akademisi, Pelaku Usaha dan Para
Narasumber terkait lainnya;
Hadirin serta Saudara-saudara Peserta Forum yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini guna
melaksanakan acara Konsultasi Publik Penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY tahun 2020, dalam
keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan
yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa

membaca dan merencana akan dibawa kemana daerah kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Hadirin dan Saudara-saudara Sekalian,

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Untuk itulah, maka pelaksanaan forum konsultasi publik kali ini selain sebagai sebuah kebutuhan perencanaan pembangunan, juga didasarkan atas peraturan perundangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah, mekanisme perumusan rencana pembangunan daerah dilakukan secara maksimal dengan melibatkan para pemangku kepentingan/ stakeholders terkait melalui forum konsultasi publik. Oleh karenanya, tahapan forum konsultasi publik harus dilaksanakan dalam setiap perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Forum konsultasi publik ini merupakan forum yang dominan untuk menangkap isu-isu strategis tantangan pembangunan DIY tahun 2020. Untuk menerima masukan atas pelaksanaan pembangunan tahun 2018 yang menyempurnakan pelaksanaan 2019 dan sebagai input bagi perencanaan 2020 dari *stakeholders* terkait. Melalui forum konsultasi publik ini diharapkan akan tercipta konsensus atau kesepakatan, utamanya pada perumusan isu strategis, prioritas, dan tema pembangunan

tahun 2020. Dengan demikian, koreksi, masukan, sumbangsih pemikiran dan saran dari peserta forum konsultasi publik merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD DIY tahun 2020.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, diharapkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dapat diakomodasikan dalam fase-fase awal tahapan perencanaan pembangunan, dan tidak secara tiba-tiba tercantum dalam tahap akhir proses penganggaran. Konsistensi substansi perencanaan menjadi penting dalam mewujudkan *good governance*, karena dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu bentuk perjanjian kinerja dengan publik, yang tidak hanya dievaluasi oleh pemerintah pusat saja, namun juga diawasi oleh masyarakat luas. Untuk itulah, maka forum konsultasi publik ini, diharapkan dapat berlangsung dengan efektif dan optimal dan akan menghasilkan RKPD DIY tahun 2020 yang akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E M B U K A A N
PAMERAN EXPO UKM ISTIMEWA 2019
Yogyakarta, 14 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin Tamu Undangan, serta Para Peserta Pameran yang saya hormati,

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul ditempat ini, dalam kondisi sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, kami menyambut baik diselenggarakannya Pameran UKM Istimewa 2019 ini, dan terimakasih kepada para pengrajin/pengusaha kecil dan menengah yang telah berpartisipasi guna mendukung suksesnya pameran ini. Semoga pameran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang dipamerkan, dan ke depan akan memberikan kemajuan bagi para peserta di dalam menghadapi persaingan dan kompetisi yang semakin pesat saat ini.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Kita semua menyadari bahwa untuk membangun ekonomi daerah, perlu adanya suatu identifikasi terhadap keunggulan potensi daerah, potensi pasar dan penentuan strategis terhadap pembangunan daerah itu sendiri, dengan pengembangan pasar antara lain melalui promosi atau publikasi, berupa kegiatan pameran seperti yang diselenggarakan pada saat ini.

Pameran ini mempunyai arti penting sebagai bahan referensi dan informasi serta promosi tentang potensi unggulan UKM yang dimiliki DIY, khususnya tentang produk kerajinan dan lainnya. Dengan harapan kegiatan ini akan dapat dipakai oleh para pengunjung dan *buyers*, untuk melakukan hubungan bisnis terhadap produk yang mereka inginkan.

Pameran ini juga merupakan bukti nyata telah dilaksanakannya upaya pembinaan oleh Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya, di dalam melakukan kegiatan pemberian modal usaha, edukasi, asistensi dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas para pelaku wirausaha. Program pembinaan ini sangat penting sebagai upaya kita, untuk meningkatkan serta menjamin keberlanjutan bisnis atau usaha para pelaku usaha dan pengrajin bersekala kecil dan menengah agar dapat mandiri, maju dan terus berkembang.

Saya percaya, bahwa para peserta pameran telah memiliki semangat pantang menyerah terhadap keadaan dan selalu bekerja keras untuk meningkatkan kegiatan produksinya menuju kemandirian. Dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, dan dengan pengalaman maka ke depan diharapkan para peserta pameran akan menjadi lebih berdaya dan tangguh, di dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi termasuk menghadapi dunia pasar global, yang penuh dengan tantangan serta daya saing yang semakin berat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Pameran ini, merupakan peluang sekaligus kesempatan baik di dalam membangun dan meningkatkan kemampuan usaha dalam pengelolaan organisasi usaha, pengelolaan pemasaran, pengembangan bentuk-bentuk jejaring (*networking*) yang mungkin bisa dikembangkan dalam peningkatan usahanya. Para pelaku usaha dapat mempertunjukkan, memperagakan dan memasarkan hasil produksinya, agar lebih dikenal oleh masyarakat. Pameran ini merupakan bentuk sarana guna mempertemukan antara produsen dan konsumen, sehingga mereka dapat langsung berinteraksi dan berkompetisi untuk memperoleh nilai jual yang layak. Demikian pula, para perajin akan dapat memperoleh ide-ide baru untuk memenuhi permintaan pasar, hal ini sekiranya sesuai dengan tema pameran yaitu *“Menjadi Entrepreneur Itu Keren”*.

Kita harus selalu meningkatkan kualitas produk, perkarya kreatifitas, motif, gaya serta warna, agar dapat bersaing di pasar, karena di dalam pasar terbuka kita akan berkompetisi/bersaing dengan produk dari negara lain. Untuk itulah, kita harus bekerja lebih baik, lebih kreatif dan inovatif, selalu mengikuti perkembangan dan permintaan para konsumen serta senantiasa mengikuti atau mempertimbangkan isu-isu perdagangan internasional, seperti produk yang ramah lingkungan dan produk yang peduli akan kesehatan. Di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan memunculkan dan mendaftarkan brand atau merk untuk produk yang kita hasilkan.

Hal ini semata-mata kita lakukan dalam rangka mendukung serta menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan di era persaingan global saat ini. Selanjutnya kepada peserta pameran, saya ucapkan selamat berpameran dan semoga berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memanjatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Expo UKM Istimewa 2019 dengan tema “Menjadi Enterpreneur Itu Keren”, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV ANGKATAN II
BADAN DIKLAT DIY TAHUN 2019

Gunungsempu, 15 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Kepala Badan Diklat DIY, Para Widyaiswara, yang saya hormati
- Hadirin, dan Peserta Diklat yang berbahagia.

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insyallah* penuh berkah ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadiran *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini (Badan Diklat DIY) Tahun 2019.

Selamat datang di Kampus Badan Diklat DIY Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul, kepada para peserta

Diklat. Kehadiran Saudara-saudara semua, menunjukkan komitmen Saudara yang begitu tinggi terhadap pembangunan sumber daya aparatur di negara kita. Mudah-mudahan suasana Badan Diklat DIY yang tenang dan jauh dari keramaian, dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.

Peserta Diklat dan Hadirin sekalian,

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV merupakan program yang mentransformasi peserta Diklat menuju tujuan yang telah ditetapkan dalam program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Setiap peserta Diklat akan melalui serangkaian proses yang telah disusun untuk membawa peserta kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan itu, maka setiap peserta perlu memahami tujuan dan rangkaian proses tersebut agar dapat mengikuti program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV secara lebih terarah, sehingga bisa mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah, menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan memimpin pada jenjang jabatan struktural eselon IV.

Kemampuan memimpin tersebut diwujudkan dengan kemampuannya dalam memimpin perubahan di unit kerjanya. Perubahan ini hanya dapat terwujud jika pejabat struktural eselon IV mampu menetapkan area dan fokus perubahan, serta dapat menyamakan visi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan, menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), kemudian mempengaruhi dan memobilisasi *stakeholdernya* mendukung perubahan tersebut.

Dengan demikian, keikutsertaan Saudara-saudara bukan hanya didasari oleh kewajiban dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan eselon IV, tetapi juga merupakan perwujudan upaya kita bersama dalam rangka mengembangkan kompetensi kepemimpinan para pejabat

struktural eselon IV, yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing, sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang diharapkan, yakni tuntutan standar kompetensi jabatan struktural eselon IV, tuntutan pelayanan publik, dan tuntutan peningkatan daya saing bangsa di era global, agar mampu memimpin secara profesional, visioner, bersih dan bertanggung jawab.

Peserta Diklat yang saya banggakan,

Pelaksanaan tugas pada jabatan struktural eselon IV hanya dapat berlangsung secara efektif dan efisien, apabila pejabat struktural yang menduduki jabatan tersebut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan struktural eselon IV. Kompetensi dimaksud diindikasikan oleh kemampuan pejabat struktural eselon IV dalam tiga ranah.

Pertama, kemampuan dalam menguasai secara teknis bidang tugasnya. *Kedua*, kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya. Dan *ketiga*, kemampuan dalam menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon IV. Sebab salah satu unsur saja tidak dimiliki, maka sulit bagi pejabat struktural eselon IV tersebut dikategorikan sebagai pejabat struktural eselon yang profesional.

Selain standar kompetensi tersebut, yang paling penting adalah kapasitas kepemimpinan perubahan yang harus dimiliki. Pemimpin perubahan yang mempunyai kemampuan kepemimpinan adaptif dan daya inovatif tinggi. Sebab dalam budaya paternalistik, posisi pemimpin memiliki peran yang sangat strategis. Penguatan kapasitas kepemimpinan akan memiliki efek yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan itu maka jabatan struktural eselon IV

adalah jabatan strategis dalam meningkatkan dan mendorong kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saya berharap, Diklat yang saudara-saudara ikuti ini hendaknya dapat membawa dampak nyata bagi peningkatan kinerja Saudara-saudara melalui penambahan wawasan, pengetahuan dan pembentukan sikap mental. Dalam kesempatan ini juga perlu saya tekankan, bahwa Diklat yang Saudara-saudara ikuti ini merupakan salah satu tahapan pengembangan kualitas aparatur. Karenanya, mengikuti Diklat dengan serius dan disiplin adalah mutlak. Saya juga minta, agar Saudara-saudara membentuk komunitas belajar yang kompak dan aktif, jika ingin menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghidupkan kelas. Dan yang utama adalah pentingnya membentuk *networking* sesama peserta, serta menjaga keseimbangan antara *task oriented* dan *human oriented*.

Para Widya Iswara, Peserta Diklat, dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat bekerja dan bertugas kepada penyelenggara serta jajaran Widyaiswara. Selamat mengikuti Diklat dengan disiplin kepada para peserta. Kita semua tentunya berharap, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ini bisa melahirkan para pemimpin perubahan yang dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan lebih mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di negara kita.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon rido-Nya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Badan Diklat DIY Tahun 2019, pada hari ini, Jum'at Legi, 15 Februari 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Diklat berjalan lancar,

serta senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya.
Amin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Gunungsempu, 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E M B U K A A N
RAPAT KOORDINASI TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA (TMMMD)TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2019
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Unit VIII Kompleks Kepatihan, 19 Februari 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang Terhormat,

- Komandan Korem 072/Pamungkas;
- Para Komandan Kodim se DIY atau yang mewakili;
- Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Daerah DIY; atau yang mewakili
- Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY atau yang mewakili.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mengikuti kegiatan Rakor TMMMD Tahap I TA 2019. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Peserta Rakor dan jajaran TNI yang telah mendukung kegiatan Rakor TMMMD ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh Pemda Kab/Kota beserta jajarannya, yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program TMMD Tahap I TA 2019, semoga kerjasama ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan hasil TMMD dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Kita pahami bersama bahwa program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian/LPNK dan komponen masyarakat yang dilaksanakan secara gotong-royong serta bukan domain dari TNI saja, dengan demikian marilah kita satukan tekad, bersatu padu dalam menyukseskan tugas mulia ini demi tercapainya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Rakor TMMD merupakan kegiatan yang mengawali pelaksanaan program TMMD Tahap I Tahun Anggaran 2019 dan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 27 Maret 2019 yang akan datang.

Rakor TMMD ini dapat dijadikan sebagai wahana yang tepat untuk melaksanakan koordinasi secara teknis, berdiskusi dan membahas berbagai program yang akan dilaksanakan pada TMMD Tahap I TA 2019.

Peserta Rapat yang saya hormati,

Pada kesempatan ini juga akan disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan TMMD Tahap I sebagai berikut :

Pertama, akan disampaikan paparan terkait dengan Moderasi Beragama: dengan materi Solusi Beragama dan Bernegara disampaikan dari Kantor Wilayah Kemenag DIY.

Kedua, Paparan Rencana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 disampaikan dari Korem 072/Pamungkas.

Ketiga, Paparan Teknis Kesiapan Bantuan Hibah TMMD Tahap I Tahun Anggaran 2019 disampaikan dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY.

Diharapkan pula pada pelaksanaan Rakor kali ini adanya saran dan masukan serta ide-ide pemikiran yang kreatif, inovatif dan konstruktif, guna mendorong upaya peningkatan dan pengembangan program TMMD ke depan.

Demikian pengantar sambutan saya pada Rapat Koordinasi TMMD Tahap I Tahun Anggaran 2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas untuk kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara yang kita cintai bersama. Dan dengan mengucap *Bismillaahirrohmaanirrahiim*, Rapat Koordinasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap I Tahun Anggaran 2019, saya nyatakan secara resmi dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Unit VIII Kompleks Kepatihan, 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E N G A R A H A N
PENYUSUNAN LKPJ DAN LKj GUBERNUR
TAHUN 2018
Gedung Radyosuyoso, 4 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul ditempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Pada kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwa LKPJ Gubernur DIY termaktub dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pasal 15 ayat (2) b, bahwa Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada DPRD, dengan disajikan data capaian pada tahun yang

bersangkutan, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DIY.

Secara teknis, penyusunan LKPJ Gubernur DIY kepada DPRD setiap Akhir Tahun Anggaran berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY, antara lain, dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*); yang kesemuanya dalam rangka, secara bertahap mewujudkan masyarakat DIY yang maju dan sejahtera untuk semua.

Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan yang ada. Yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat secara luas. Namun demikian disamping keberhasilan sekiranya juga masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan Reviu disini adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan ketentuan tersebut di atas, maka saya menyambut baik pertemuan yang dihadiri oleh seluruh OPD DIY pada hari ini, dengan harapan semua OPD akan fokus pada penyusunan LKPJ dan LKj Gubernur Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada pertemuan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Gedung Radyosuyoso, 4 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENUTUPAN RAPAT KOORDINASI DAERAH PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DIY TAHUN 2019
Yogyakarta, 20 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Kepala Perwakilan BKKBN DIY;
Yang saya hormati, Para Narasumber;
Hadirin dan Para Peserta Pertemuan yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa dengan tetap semangat dan selamat untuk selamanya.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 DIY menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Penduduk, *Total Fertility Rate (TFR)*, *Contraseptive Prevalence Rate*, *Unmed Need* dan ASFR

15-19 tahun mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2000. Walaupun kondisi kenaikan tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat nasional, namun jika tidak segera disikapi dengan seksama maka kemungkinan akan meningkat lagi.

Untuk itu perlu komitmen yang tinggi untuk mendorong pada penguatan kelembagaan dan penguatan program dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk agar posisi tersebut minimal dapat dipertahankan ataupun diturunkan.

Adapun beberapa permasalahan yang perlu dicermati di DIY antara lain: *pertama*, meningkatnya jumlah penduduk dibandingkan dengan proyeksi dan tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. *Kedua*, Angka kemiskinan diatas rata-rata tingkat nasional. *Ketiga*, Komposisi penduduk usia lansia diatas rata-rata tingkat nasional yaitu 9,5 persen. *Keempat*, melemahnya pembinaan kesertaan KB sehingga drop out peserta KB yang cukup tinggi serta banyaknya pernikahan di bawah umur dan lain sebagainya.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Adanya keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi

pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Untuk itulah, saya sampaikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi ini, dengan harapan dapat meningkatkan komitmen bersama antar pemangku kepentingan tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat DIY maupun di Kabupaten/Kota yang terintegrasi.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap *Syukuralhamdulillah*, Rapat Koordinasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KERJA DAERAH
KOORDINASI DAN SINKRONISASI
JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
Aula Unit IX Kompleks Kepatihan, 13 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Para Narasumber;
- Para Peserta Rapat Kerja Daerah Koordinasi Dan Sinkronisasi Jaminan Kesehatan Semesta;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Rapat Kerja Daerah Koordinasi Dan Sinkronisasi Jaminan Kesehatan Semesta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Dalam Peta Jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional ditetapkan bahwa pencapaian *universal health coverage* akan tercapai di tahun 2019. Tahapan pencapaian *universal health coverage*, diawali pada tahun 2012 dengan

integrasi kepesertaan dari beberapa program jaminan kesehatan ke dalam BPJS Kesehatan (Jamkesmas, JPK Jamsostek, Askes, dan peserta TNI/Polri), Integrasi PJKMU/Jamkesda di daerah kedalam BPJS Kesehatan, dan perluasan kepesertaan di kelompok pemberi kerja dan mandiri.

Khusus untuk integrasi Jamkesda, proses integrasi ke BPJS Kesehatan harus selesai dalam dua tahun semenjak BPJS Kesehatan resmi dijalankan mulai 1 Januari 2014. Sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS, penyelenggaraan jaminan kesehatan hanya dikelola oleh BPJS yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu ke depan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah perlu diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Kesiapan Pemda DIY dalam integrasi jamkesda DIY ke dalam BPJS JKN (*universal health coverage*) perlu dilihat dari beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain, Verifikasi dan Validasi Data. Pemecahan permasalahan data kepesertaan merupakan langkah awal proses integrasi Jamkesda ke dalam JKN. Data terpadu yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut dirinci berdasarkan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perubahan kepesertaan dilakukan melalui mekanisme *updating* data yang dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan dengan dengan jumlah kuota yang sama dengan kuota yang telah ditetapkan.

Dasar tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam membenahi basis data kepesertaan. Selain lebih tepat sasaran, basis data yang valid akan lebih meringankan pemerintah daerah dari sisi penganggaran. Hal ini dikarenakan penggantian peserta yang tidak memenuhi syarat berdasarkan mekanisme verifikasi, akan digantikan dengan peserta Jamkesda DIY. Artinya

terdapat pengurangan beban penganggaran APBD dari pembiayaan peserta Jamkesta.

Kemudian, Kebijakan Penganggaran di mana integrasi kepesertaan Jamkesta ke dalam JKN BPJS membawa konsekuensi pada penganggaran APBD. Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan PBI JKN wajib disertakan dalam program JKN mandiri. Terdapat selisih premi antara PBI JKN dengan program PBI Jamkesta. Hal ini perlu disikapi dengan memberikan alternatif-alternatif kebijakan dalam upaya integrasi yang lebih efektif dan efisien dari sisi penganggaran.

Skema yang ditawarkan adalah dengan membayar penuh premi JKN mandiri, bagi masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta PBI JKN atau Pemda DIY, memberikan subsidi premi JKN mandiri dengan besaran sesuai dengan premi PBI Jamkesta dan kekurangannya menjadi tanggungan masyarakat tersebut.

Hadirin sekalian,

Aspek berikutnya yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Sistem Jaminan Kesehatan. Pembayaran klaim JKN didasarkan pada diagnosa penyakit yang sesuai dengan jenjang sarana pelayanan. Hal ini menuntut tersedianya sistem rujukan yang baik dan ditunjang sarana prasarana kesehatan yang memadai. Penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam persiapan integrasi.

Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas harus direspon oleh penyelenggara dalam hal ini adalah pemerintah. Pelayanan yang efektif dan berkualitas mengedepankan penyederhanaan proses mekanisme. Penggunaan teknologi informasi dalam keberhasilan program menjadi mutlak

sebagai infrastruktur penghubung antara penyedia layanan kesehatan dan penyedia jaminan kesehatan.

Dan yang terakhir Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan. Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum menyadari, tentang pentingnya jaminan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial. Sehingga masih terdapat masyarakat DIY yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Selain itu, masyarakat yang berminat mengikuti program JKN secara mandiri, masih belum sepenuhnya memahami sistem dan mekanisme JKN. Peran Pemda dalam rangka advokasi program jaminan kesehatan adalah melalui sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Diharapkan pada tahun 2019 *universal health coverage* jaminan kesehatan segera terwujud di DIY.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Aula Unit IX Kompleks Kepatihan, 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KOORDINASI
EVALUASI CAPAIAN MONITORING *CENTRE FOR
PREVENTION* (MCP) DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
2019 DI PEMDA DIY OLEH TIM KOORDINASI KPK
WILAYAH DIY
Yogyakarta, 20 Februari 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati:

- Pimpinan beserta Tim Koordinasi Wilayah DIY Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
- Para Kepala OPD Pemda DIY;

Hadirin Tamu Undangan serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Monitoring *Centre For Prevention* (MCP) dan Penyusunan Rencana Aksi 2019 di Pemda DIY bersama Tim Koordinasi KPK Wilayah DIY dengan seluruh OPD Pemda DIY, dalam kondisi sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di negara kita adalah meningkatnya kasus korupsi dari waktu ke waktu. Kondisi ini sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, hal ini apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terlepas dari adanya ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas terjadinya kasus korupsi. Karena permasalahan ini juga berhubungan erat dengan sikap, perilaku, komitmen serta struktur dan sistem politik.

Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena masih lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada regenerasinya. Dan juga sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggungjawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada generasi muda terdidik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya.

Hadirin dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Beberapa tahun yang lalu Pemerintah Daerah DIY juga telah dilaksanakan penancangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Penancangan DIY sebagai Zona Integritas telah diawali dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawai di Pemerintah Daerah DIY dan ditandai dengan penandatanganan deklarasi/pernyataan komitmen oleh pimpinan, dan dipublikasikan secara luas, dengan maksud agar semua pihak

dapat memantau, mengawal, dan mengawasi, serta berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, dengan harapan terwujudnya Pemerintah Daerah yang sungguh-sungguh berintegritas dan bebas dari korupsi.

Momentum tersebut merupakan langkah awal dalam pemberantasan korupsi yang perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan DIY Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara paralel dan bersinergi dengan kegiatan pencegahan korupsi, yang meliputi: penataan/penyempurnaan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik serta perubahan budaya kerja.

Sejalan dengan hal tersebut maka atas nama Pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Koordinasi KPK RI Wilayah DIY yang hari ini melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Monitoring *Centre For Prevention* (MCP) dan Penyusunan Rencana Aksi 2019 di Pemda DIY bersama seluruh OPD Pemda DIY. Momentum ini sekiranya merupakan langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi dan ini harus menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pemerintahan dan semua harus berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KOORDINASI
TIM KOORDINASI WILAYAH DIY KPK RI DENGAN
INSPEKTORAT DAN BADAN/DINAS PENGELOLA ASET
SE-DIY
Yogyakarta, 22 Februari 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati:

- Pimpinan; beserta Anggota Tim Koordinasi Wilayah DIY KPK RI,
- Para Inspektur dan Kepala Badan/Dinas Pengelola Aset se-DIY;

Hadirin Tamu Undangan serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Wilayah DIY KPK RI dengan Inspektur dan Kepala Badan/Dinas Pengelola Aset se-DIY, dalam kondisi sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di negara kita adalah meningkatnya kasus korupsi dari waktu ke waktu. Kondisi ini sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, hal ini apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal tersebut maka atas nama Pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Koordinasi KPK RI Wilayah DIY yang hari ini melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Inspektorat dan Badan/Dinas Pengelola Aset se-DIY. Momentum ini sekiranya merupakan langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi dan ini harus menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pemerintahan dan semua harus berkomitmen, untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Terkait pembahasan pada pertemuan ini dapat saya sampaikan bahwa, regulasi paradigma pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi secara jelas memberikan ruang kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan kewenangan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sekaligus sebagai upaya untuk mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Daerah melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi, mengawal reformasi birokrasi serta mengawasi aparat melalui investigasi.

Pengawasan disini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya, untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Hadirin yang saya hormati,

Sedangkan berkaitan dengan telaahan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini terkait dengan pengaduan langsung maupun dengan E-Lapor yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang merupakan aplikasi media sosial dengan melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan. Aplikasi Lapor ini berupaya untuk menjembatani partisipasi publik, dalam pembangunan nasional antara masyarakat umum dengan pemerintah.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Maka telah jelas bahwa para penyelenggara negara memiliki kewajiban, untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, diawali dengan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini penting, karena dengan SDM yang berkualitas maka penerapan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
TEMU INVESTOR 2019
Yogyakarta, 21 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
- Para Narasumber;
- Para Peserta Temu Investor;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Temu Investor 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya hormati,

Dalam teori ekonomi diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena disatu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti

semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula.

Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Dalam konteks pembangunan nasional maupun regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Indonesia saat ini memang telah diarahkan untuk pencapaian target investasi tinggi. Di sisi lain, beberapa lembaga pemeringkat investasi juga telah menaikkan peringkat kredit Indonesia tahun ini. Selain itu, kerangka regulasi di Indonesia juga sudah menjadi lebih kondusif untuk investasi. Perbaikan permasalahan birokrasi dan izin usaha akan mendorong penguatan perekonomian formal.

Saat semua permasalahan tersebut diselesaikan, investasi baik dari dalam dan luar negeri akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia dalam hal produktivitas, teknologi dan praktek manajemen. Investasi akan menjadi kekuatan bagi pertumbuhan dan reformasi ekonomi di Indonesia. Sekarang adalah saatnya untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki potensi luar biasa pada aspek sumber daya manusia terutama dalam kreatifitas menciptakan produk-produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di pasar global. Kemudian potensi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga tinggi dimana 95 persen perekonomian DIY disumbang oleh UMKM.

UMKM merupakan sektor perekonomian yang telah terbukti paling kuat untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Sektor tersebut dinilai kuat

karena telah teruji memiliki kemampuan bertahan ketika terjadi gejala perekonomian di level nasional maupun internasional.

Selanjutnya, dengan adanya acara Temu Investor 2019 secara langsung ini dapat menjadi momentum yang baik untuk berbagi pengetahuan dan informasi bahkan melakukan peninjauan, kesepakatan bisnis maupun investasi yang mungkin dapat dilakukan oleh para investor dengan pelaku usaha yang ada di DIY atau bahkan dengan Pemerintah Daerah DIY sendiri.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya seraya mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Temu Investor 2019, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI